



KR-Antara/HO-Humas Pemprov Jateng

Dengan menumpang pesawat Hawker 900 XP, Menhub bersama Mensesneg, Menteri PUPR dan Gubernur Jateng meninjau progres pembangunan Bandara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

BANDARA NGLORAM DI CEPU, BLORA

Jadi 'Pengumpan', Beroperasi Tahun Ini

BLORA (KR) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau progres proyek pembangunan Bandara Udara Ngloram di Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang ditargetkan beroperasi di 2021, pada Minggu (3/1).

"Bandara Ngloram kita harapkan dapat beroperasi pada 2021 ini, untuk melayani penerbangan reguler dan carter. Karena itu saya hadir di sini untuk mengecek progres pembangunan yang telah dilakukan," kata Budi Karya Sumadi yang bersama rombongan menumpang pesawat terbang jenis Hawker 900 XP.

Dikatakan, dengan landasan pacu yang telah dibangun sepanjang 1.500 meter saat ini, Bandara Ngloram sudah mampu didarati pesawat jenis ATR-72. Pada 30

Desember 2020 lalu, telah dilakukan *proving flight* oleh Pesawat NAM AIR ATR-72 untuk memastikan aspek keselamatan, dan pendaratan dapat dilakukan dengan selamat dan lancar. "Bandara Ngloram akan menjadi bandara *spoke* (pengumpan) yang direncanakan melayani penerbangan untuk tujuan Semarang, Balikpapan, Jakarta (Halim Perdanakusuma), Malang, dan Banyuwangi," ungkap Menhub.

Menhub mengapresiasi komitmen dan dukungan Pemprov Ja-

teng dan Pemkab Blora, untuk membebaskan lahan seluas 3,2 hektare pada 2019 dan akan membebaskan lahan 3,6 hektare pada 2021. Budi juga mengapresiasi Kementerian PUPR yang mendukung pembangunan dan pengembangan akses jalan dari dan ke Bandara Ngloram. Menhub berpesan kepada jajaran Ditjen Perhubungan Udara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik sesuai target waktu, dan memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan terpenuhi dengan baik, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Ditjen Perhubungan Udara mencatat pada 2020 (Tahap 1) telah dibangun landasan pacu (*runway*) sepanjang 1.500 x 30 meter, *taxiway*, *appron*, terminal penumpang seluas 2.850 m² yang saat ini masih dalam proses pembangunan (progres 35 persen), pemasangan

pagar, dan pemasangan *Airfield Lighting System* (AFL).

Selanjutnya, pada 2021 (Tahap 2) dilanjutkan pembangunan perpanjangan *runway* menjadi 1.600 x 30 m, penyelesaian pembangunan terminal penumpang, pemasangan peralatan X-Ray, pembangunan gedung kantor, gedung PKP-PK, pembuatan jalan akses masuk dan pelataran parkir terminal.

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor Km 31 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Bandara Ngloram, pembangunan Bandara Ngloram sisi udara dan darat akan dikerjakan dalam empat tahap pembangunan. Pada 2018, Bandara Ngloram adalah bandara milik PT Pertamina yang diserahkan Kementerian ESDM kepada Pemda yang kemudian menyerahkannya kepada Kemenhub untuk dibangun menjadi bandara komersial. (Ant/San)-f

KARYAWAN TERPAPAR COVID-19 Rawat Inap 3 Puskesmas Tutup

KULONPROGO (KR) - Semakin meningkatnya kasus Covid-19 pada masyarakat Kulonprogo, maka risiko terpapar bagi tenaga kesehatan juga meningkat. Saat ini ada 36 karyawan kesehatan yang terpapar Covid-19, baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit. "Untuk sterilisasi tempat pelayanan dan menunggu hasil swab test bagi kontak erat dari kasus sebelumnya, maka Puskesmas harus mengurangi pelayanan," kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo drg Bani Rahayujati MKes, Minggu (3/1).

Sebanyak 36 karyawan kesehatan tersebut, 21 di antaranya berasal dari tiga Puskesmas, yakni Puskesmas Samigaluh 1 ada 4 kasus konfirmasi Covid-19, sehingga sampai tanggal 7 Januari 2021 harus menutup pelayanan rawat inapnya. Namun untuk rawat jalan masih memberikan pelayanan.

Puskesmas Sentolo 1 ada 9 karyawan kesehatan yang terpapar covid, sehingga sampai 4 atau 5 Januari 2021 pelayanan rawat inap ditutup. Sedang pelayanan yang dibuka melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD). Puskesmas Sentolo 2 ada 8 karyawan kesehatan yang terkonfirmasi positif Covid. Sehingga pelayanan ditutup hingga Senin atau Selasa (4 atau 5/1).

Sementara itu, perkembangan kasus Covid-19 Kulonprogo pada 1 Januari 2021 ada penambahan 55 kasus baru. Sehingga total kasus 10.065. Sebanyak 28 masih diisolasi di rumah sakit, 282 isolasi mandiri di rumah dan sembuh 737. Dan 2 Januari terdapat 9 kasus, selesai isolasi 14. Sehingga total kasus ada 1.074 terdiri 361 isolasi, 187 selesai isolasi, 518 sembuh, dan 18 meninggal. (Wid)-f

KASUS COVID-19 MASIH TINGGI Keluarga Berperan Penting Patuhi Prokes

YOGYA (KR) - Kenaikan kasus positif Covid-19 di DIY yang masih cukup tinggi, membutuhkan perhatian dan komitmen seluruh pihak dalam menegakkan dan mematuhi protokol kesehatan (prokes). Tidak hanya di lingkungan perkantoran, sekolah, destinasi wisata atau fasilitas publik, tapi juga di lingkungan keluarga. Mengingat saat ini beberapa kasus baru justru muncul dari lingkungan keluarga.

"Penegakan protokol kesehatan butuh peran aktif masyarakat termasuk keluarga. Karena satu-satunya cara yang sangat efektif mencegah penularan Covid-19 adalah dengan menerapkan protokol kesehatan di mana pun dan kapan pun. Jangan pernah menganggap rumah sebagai tempat yang tidak perlu menerapkan protokol kesehatan," kata Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta Dr dr Irene MKM, Minggu (3/1).

Irene mengatakan, sebagai salah satu laboratorium di DIY yang memeriksa sampel pihaknya terus berupaya membe-

rikan layanan terbaik, agar sampel yang masuk hasilnya bisa segera diketahui. Dengan begitu penanganan Covid-19 bisa lebih cepat dan maksimal. Untuk itu, selama Natal dan tahun baru ini petugas Lab BBTKLPP Yogyakarta juga tidak libur.

Menurut Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih, kasus positif Covid-19 di DIY bertambah 218 kasus pada Minggu (3/1). Dengan demikian total kasus terkonfirmasi menjadi 12.897. Sebagian besar berdomisili di Kabupaten Bantul 70 orang, Sleman 68, Kota Yogyakarta 40, Kulonprogo 25 dan Gunungkidul 15 orang.

Dari laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY, pasien sembuh bertambah 221 menjadi 8.724. Distribusi kasus sembuh sebagian besar di Sleman 90 orang, Kota Yogya 76, Bantul 49, serta masing-masing tiga di Kulonprogo dan Gunungkidul. Untuk kasus meninggal bertambah 13 menjadi 278 kasus. (Ria/Ira)-f

OKUPANSI HOTEL HANYA 18,5 PERSEN Tahun Baru 2021 Terkelam Sepanjang Sejarah

YOGYA (KR) - Saat libur Natal lalu, rata-rata okupansi hotel-hotel berbintang di DIY masih bisa mencapai 50 persen. Namun, pada malam tahun baru, 31 Desember lalu okupansi hanya 45 persen. Parahnya, jika dihitung okupansi rata-rata di semua kelas hotel di DIY hanya mencapai 18,5 persen.

"Menjadi sejarah kelam dibanding tahun 2019 lalu sebelum pandemi Covid-19 hampir semua hotel full 100 persen," ucap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono kepada KR, Minggu (3/1).

Didampingi Ketua Satgas Covid-19 BPD PHRI DIY yang juga Ketua DPD IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association) DPD Yogyakarta, Herryadi Baiin, Deddy menyebutkan, kondisi ini bukan lagi memukul perhotelan, tetapi sudah mencekik. "PHRI DIY yang anggotanya dari beberapa sektor yaitu tengah, selatan, barat, timur, utara, rata-rata terpukul bahkan ada yang okupansinya hanya 10 persen," jelasnya.

Herryadi menambahkan, dampak pandemi Covid-19, dengan jumlah kasus yang semakin bertambah mengakibatkan pemerintah membuat kebijakan yang sa-

ngat mendadak, sehingga wisatawan akhirnya banyak membatalkan reservasi. "Kebijakan pemerintah memperpendek *long weekend* dari tanggal 23-31 Desember menjadi 23-29 Desember dan mewajibkan mereka yang melakukan perjalanan membawa surat kesehatan hasil PCR/Swab atau Rapid tes antigen serta pemberlakuan jam operasional seluruh kegiatan yang hanya diizinkan sampai jam 22.00 dengan persyaratan wajib lapor, ditambah isu-isu yang beredar jangankan ke Yogya dulu, Jalan Malioboro ditutup, Yogya akan memberlakukan PSBB, jelas memukul hotel," ujarnya.

Disebutkan, sebelum ada kebijakan dan isu di atas *onbooked* okupansi pada malam tahun baru di beberapa hotel ada yang sudah mencapai 80-90 persen. "Namun pada akhirnya terjadi pembatalan hingga 40-50 persen, kami mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19, karena kami juga tidak ingin berpikir hanya dari sisi ekonomi, namun, kami berharap kebijakan-kebijakan yang disampaikan benar benar sudah terencana, sudah disosialisasikan dan didukung payung hukum yang berlaku," katanya. (R-4)-f

Minggu, Puncak Arus Balik Libur Nataru

JAKARTA (KR) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memantau pergerakan arus kendaraan maupun penumpang, untuk mengantisipasi puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2020/2021 yang diprediksi terjadi Minggu (3/1).

"Sebelumnya kami telah memprediksi, puncak arus balik terjadi Minggu (3/1) ini, karena Senin (4/1) sebagian besar masyarakat sudah mulai kembali melakukan aktivitas sehari-hari. Kami telah mengimbau masyarakat agar pulang lebih awal untuk menghindari penumpukan penumpang atau kepadatan arus kendaraan, yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati di Jakarta, Minggu (3/1).

Adita menjelaskan, fokus Pemerintah adalah mencegah terjadinya penularan Covid-19 di transportasi umum. Karena itu, berbagai kebijakan telah dikeluarkan untuk memperketat pengaturan perjalanan orang di semua moda angkutan merujuk pada Surat Edaran yang dikeluarkan Satgas Penanganan Covid-19. Menurut Adita, berdasarkan data se-

mentara yang dihimpun dari Sistem Angkutan dan Sarana Transportasi Indonesia (Siasati) Kemenhub selama masa pemantauan, jumlah pergerakan penumpang mulai 18 Desember 2020 (H-7) hingga 3 Januari 2021 (H+9), yakni untuk angkutan jalan (bus) jumlah pergerakan penumpang dari 48 terminal yang dipantau mencapai 734.100 orang. Puncak arus keberangkatan penumpang angkutan jalan terjadi pada 27 Desember 2020 (H+2) dengan jumlah penumpang mencapai 57.271 orang.

Untuk angkutan penyeberangan, jumlah pergerakan penumpang dari 22 pelabuhan penyeberangan yang dipantau mencapai 1.466.378 orang. Puncak arus keberangkatan penumpang terjadi pada 23 Desember 2020 (H-2) dengan jumlah penumpang mencapai 121.865 orang.

Sementara, angkutan udara jumlah pergerakan keberangkatan penumpang dari 50 bandara yang dipantau hingga kemarin mencapai 2.053.848 orang. Puncak arus keberangkatan penumpang terjadi pada 30 Desember 2020 (H+5) dengan jumlah penumpang mencapai 219.462 orang. (Imd)-f

DIPERPANJANG HINGGA MARET Listrik 450 VA Tetap Gratis

JAKARTA (KR) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir mengatakan soal komitmen Presiden Joko Widodo untuk tetap memastikan rakyat yang ekonominya terdampak pandemi tetap mendapat stimulus dari pemerintah.

"Sesuai instruksi Bapak Presiden, kami di KPCPEN yang di dalamnya juga ada Pak Menko Airlangga Hartarto dan Ibu Sri Mulyani, sebagai Menkeu baru-baru ini melakukan rapat dengan Menteri ESDM agar PLN terus memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (3/1).

Menurutnya, subsidi biaya listrik tetap berlaku sesuai dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Pelanggan dengan daya 450 VA akan mendapatkan pembebasan biaya penuh alias gratis. Hal ini menjadi bukti keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Erick pun menjelaskan, subsidi biaya listrik juga mengacu kepada pelanggan dengan daya 900 VA. Perpanjangan subsidi ini berlaku pada triwulan pertama tahun 2021 yakni Januari hingga Maret. Kemudian akan dilihat kembali kemungkinan untuk terus memperpanjang subsidi sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdampak. (Sim)-f

ASN Tak Boleh Masuk Ormas Terlarang

JAKARTA (KR) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menegaskan, aparatur sipil negara (ASN) dilarang menjadi anggota organisasi masyarakat (ormas) yang telah diputuskan pemerintah sebagai organisasi terlarang. Selain itu, ASN juga dilarang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan organisasi terlarang tersebut.

"ASN dilantik dan diambil sumpahnya untuk setia kepada pemerintahan yang sah, Pancasila dan UUD 1945, sehingga apabila ASN sebagai anggota aktif organisasi yang dilarang itu, dilarang secara prinsip," tegas Tjahjo Kumolo di Jakarta, Minggu (3/1).

Tjahjo menyebutkan, yang termasuk organisasi terlarang itu adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) serta organisasi masyarakat yang baru saja dilarang pemerintah adalah Front Pembela Islam (FPI). Bagi ASN yang terlibat sebagai anggota, mengikuti kegiatan, hingga sekadar menggunakan atribut dari organisasi terlarang tersebut akan dikenakan sanksi.

Hal ini dikarenakan organisasi-organisasi tersebut sudah dilarang, sudah dibekukan dan tidak boleh membuat kegiatan apa pun. "Indonesia adalah negara hukum. Apa yang menjadi keputusan pemerintah harus diikuti seluruh warga negara, khususnya ASN," jelasnya.

Tjahjo menjelaskan, akan menerbitkan surat edaran yang melarang ASN untuk terlibat secara aktif dan tidak boleh menggunakan atribut dari organisasi yang tidak terdaftar di pemerintah serta organisasi yang telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang. (Sim)-f



KR-Surya Adi Lesmana

PANORAMA MATAHARI TERBIT: Kabut dan semburat warna jingga pada langit mewarnai datangnya pagi di Perbukitan Batu Papal, Prambanan, Sleman, Minggu (3/1). Tempat ini bisa jadi pilihan masyarakat untuk menikmati panorama pedesaan dengan daya tarik eksotismenya matahari terbit.